

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022  
 "RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"  
 Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth  
 dalam mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh

## Pemantauan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Miskin Perkotaan

Topik Ismail<sup>a</sup>, Septiana Dwi Putrianti<sup>b</sup>, Nita Nurliawati<sup>c</sup>

<sup>a</sup> BBPPKS Bandung

<sup>b,c</sup> Politeknik STIA LAN Bandung

e-mail : <sup>a</sup> topik.ismiael@gmail.com · <sup>b</sup> nitanurliawati@poltek.stialanbandung.ac.id

### Abstrak

Paper ini menganalisis tingkat kesejahteraan rumah tangga miskin di perkotaan untuk memantau kesejahteraan keluarga penerima manfaat program keluarga harapan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Melalui pendekatan *Nested Spheres of Poverty* sebagai analisis data untuk mengetahui tingkat kesejahteraan berdasar pada kesejahteraan subjektif, inti dan pendukung. Berdasarkan hasil penelitian, tingkat kesejahteraan keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan di Kecamatan Babakan Ciparay masuk dalam Sejahtera. Kesejahteraan rumah tangga keluarga penerima manfaat akibat implikasi dari subjektifitas dan objektivitas yang berjalan secara simultan. Namun, tingkat kesejahteraan rumah tangga KPM PKH di perkotaan belum mengarah kepada karakteristik demografi atau intra-kesejahteraan keluarga KPM PKH sendiri sehingga perlu pengembangan lebih lanjut untuk menyandingkan atau mesajikan kedalam tingkat kesejahteraan rumah tangga.

**Kata Kunci:** Program Keluarga Harapan, Kesejahteraan Rumah Tangga, *Nested Spheres of Poverty*

## *Monitoring Welfare Level at Urban Poor Household*

### Abstract

*This paper analyzes the welfare level of poor households in urban areas to monitor the welfare of PKH beneficiaries. The method used in this research is descriptive quantitative. Through the Nested Spheres of Poverty approach as data analysis to determine the level of welfare based on subjective, core and spheres. Based on the results, the level of welfare of the families of the beneficiaries of the Program Keluarga Harapan in Babakan Ciparay District is included in Prosperous. The welfare of the beneficiary family's household as a result of the implication of subjectivity and objectivity that runs simultaneously. However, the level of household welfare of PKH beneficiaries in urban areas has not led to the demographic characteristics or intra-welfare of the PKH beneficiaries family itself so that further development is needed to pair or present it into the level of household welfare.*

**Keywords:** Program Keluarga Harapan, *Welfare Level*, *Nested Spheres of Poverty*

### A. PENDAHULUAN

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan perlindungan sosial untuk mengasistensi rumah tangga miskin dalam pendidikan, kesehatan dan kesesejahteraan melalui pembiayaan non tunai. Semenjak tahun 2007 hingga sekarang, PKH telah mencapai sepuluh juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh kota/kabupaten di Indonesia. Implementasi PKH memberikan dampak bagi keluarga penerima manfaat dalam meningkatkan

pendapatan per kapita per bulan untuk pengeluaran pendidikan dan kesehatan (Nazara & Rahayu, 2013), meningkatkan partisipasi sekolah anak dan mengubah perilaku kesehatan (Cahyadi et al., 2020; World Bank, 2011), serta mengurangi *stunting* (Cahyadi et al., 2020).

Keberhasilan implementasi PKH terjadi karena adanya sosialisasi program, pemutakhiran data secara kontinyu dan pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Akan tetapi, bagi keluarga penerima manfaat yang

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022  
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth  
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

keluar dari program dengan kondisi yang belum sejahtera akan menghadapi tantangan preferensi dan akses sumber daya yang berbeda (P. A. Chiappori & Meghir, 2014). Terdapat 40% rumah tangga yang digraduasi sejahtera mandiri berada di desil yang lebih rendah dan ada sekitar 7% berada didesil 1 karena salah satu alasannya menganggap keluarga lain lebih membutuhkan program (Syamsulhakim & Khadijah, 2021). Hal ini tergambar pada jumlah keluarga penerima manfaat yang keluar dari PKH tahun 2020 secara nasional, yakni jumlah graduasi mandiri lebih sedikit ketimbang graduasi alamiah. Sebanyak 837.531 KPM mengalami graduasi secara alamiah dan sejumlah 341.773 KPM melewati graduasi mandiri (Syamsulhakim & Khadijah, 2021).

Selain itu, penerima manfaat PKH yang *exit* dari program dapat berdampak pada kondisi sosial ekonomi tanpa adanya ekonomi inklusif (Syamsulhakim & Khadijah, 2021) sehingga mereka akan mengalami kembali ketidakmampuan dalam mengakses pendidikan: Hal itu dikarenakan biaya pendidikan di perkotaan lebih mahal (Behrman et al., 2012). Meskipun, eks-KPM memperoleh bantuan lain dari PKH namun besarnya kontribusi program pelengkap terhadap peningkatan pendapatan KPM belum jelas (Syamsulhakim & Khadijah, 2021). Oleh karena itu, kondisi mereka dapat menjadi miskin karena pendapatan turun (World Bank, 2000). Belum lagi, penerima bantuan yang berada di wilayah perkotaan dihadapkan pada kepadatan penduduk (Cramer et al., 2004), fragmentasi sosial (Klugman, 2002), demografi dan ketimpangan pendapatan serta karakteristik perkotaan-pedesaan dapat membentuk kualitas hidup secara kesejahteraan subjektif (Diener et al., 1993; Kittiprapas, 2009; Lehman et al., 1995).

Melihat kondisi tersebut, maka perlu pengkajian lebih dalam sejauhmana tingkat kesejahteraan rumah tangga penerima bantuan di perkotaan? Sebagian besar ukuran kesejahteraan yang ada saat ini bermuara di tingkat rumah tangga (P. Chiappori, 2016). Oleh karena itu, semestinya pemantauan kemiskinan dan kesejahteraan keluarga penerima manfaat PKH dapat dilaksanakan melalui pendekatan multidimensi.

Model multidimensi diambil karena kemiskinan terjadi akibat kekurangan banyak hal. Seperti pendapatan tidak mencukupi, kebutuhan dasar

yang tidak terpenuhi: kesehatan, pendidikan, perumahan (Gonner et al., 2007), dan lebih bersifat subjektif (Diener, 1984; Gonner et al., 2007; Kittiprapas, 2009; Lehman et al., 1995) dan aspek lainnya yang mendukung upaya mandiri untuk keluarga dari kemiskinan (Gonner et al., 2007). Penelitian ini diambil karena berbagai penelitian tentang PKH telah dilakukan, seperti PKH berjalan efektif (World Bank, 2011; Cahyadi, dkk, 2018), dampak program pada kesehatan, pendidikan, modal manusia (Cahyadi et al., 2020), pentingnya resertifikasi/graduasi KPM PKH (Putri, 2021), dan graduasi KPM PKH (Syamsulhakim & Khadijah, 2021). Namun studi pengukuran kesejahteraan keluarga penerima manfaat dalam rangka pemantauan Program Keluarga Harapan belum dilakukan. Hal ini menjadi dasar perlunya penelitian yang memberikan penjelasan secara lebih mendalam tentang ukuran kesejahteraan pada penerima manfaat PKH perkotaan, khususnya di Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung. Hasilnya juga dapat digunakan oleh Fasilitator PKH atau Lembaga terkait. Oleh karena itu, tujuan penelitian adalah untuk menganalisis ukuran kesejahteraan rumah tangga KPM PKH di perkotaan.

## B. PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan melakukan survei kepada responden sebanyak 321 dari populasi KPM PKH di Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung dengan populasi sebanyak 3.211 rumah tangga. Analisis data menggunakan pendekatan *Nested Spheres of Poverty* (NeSP) dengan menentukan nilai indeks kesejahteraan subjektif (*subjective wellbeing*), nilai indeks kesejahteraan inti atau (*core wellbeing*), dan nilai indeks kesejahteraan pendukung atau (*spheres wellbeing*). Perhitungan dilakukan dengan cara mengakumulasi nilai dan membaginya dengan jumlah indikator yang ditentukan (Cahyat et al., 2007). Giuna mempermudah pengukuran tingkat kesejahteraan, maka peneliti menggunakan hasil kuartil dari penghitungan statistik dengan level Prasejahtera di kuartil pertama, Kondisi sedang bderada di kuartil kedua, sejahtera di kuartil ketiga dan sejahtera plus di kuartil keempat.

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022  
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

Berdasarkan tabel 1 tingkat kesejahteraan di Kecamatan Babakan Ciparay secara rerata berada di tingkat Sejahtera dengan nilai 63.05. Nilai rerata lebih tinggi dari nilai median, yaitu 61.83 dan standar deviasi yaitu 12.43. Artinya bahwa nilai indeks kesejahteraan menunjukkan adanya tingkat kesejahteraan rumah tangga keluarga penerima manfaat secara multidimensi homogen atau adanya kesamaan keluarga penerima manfaat yang memiliki tingkat kesejahteraanya sama.

Tabel 1 Statistik Kesejahteraan

Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung

Statistics

N	Valid	321
	Missing	
Mean		63.0570
Median		61.8300
Std. Deviation		12.43862
Minimum		20.70
Maximum		93.33
Percentiles	25	54.9950
	50	61.8300
	75	70.8350

Sumber: data Statistik Ukuran Kesejahteraan Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung

Hasil ukuran kesejahteraan rerata menunjukkan adanya implikasi dari indeks kesejahteraan subjektif, inti dan dukungan. Artinya bahwa secara multidimensi, tingkat kesejahteraan keluarga penerima manfaat PKH yang tinggal di perkotaan telah memberikan kualitas hidup mereka yang diperoleh dari ketersediaan fasilitas/utilitas yang dimiliki dengan didukung pada aspek sosial, ekonomi, politik, lingkungan, infrastruktur dan layanan.

Implikasi kesejahteraan subjektif mengarah kepada kemampuan menilai dirinya dari apa yang pernah atau belum dicapai. Oleh karena mereka mampu mengendalikan aspek kognitif mereka. Apabila mereka dihadapkan pada suatu kondisi untuk mengulangi kehidupannya, maka mereka tidak akan merubah atau tetap menjalankan kehidupannya seperti sekarang. Sebab, hal-hal yang pernah didapatkan dalam hidupnya telah mendekati dengan cita-citanya sehingga keadaan hidupnya merasa baik. Maka

dari itu, nilai indeks kesejahteraan subjektivitas dalam kondisi Sejahtera telah menyumbang nilai pada penghitungan secara agregat.

Hal lain juga didukung dari kesejahteraan inti, yaitu pendidikan, kesehatan dan standar hidup penerima manfaat. Penerima manfaat merasakan anaknya mampu berpartisipasi ke sekolah. Sementara dari segi kesehatan, penerima manfaat mampu menerapkan pola hidup sehat dan sadar dengan kesehatannya. Selain itu, untuk melakukan aktivitas rumah tangga didukung dengan berbagai kepemilikan aset, seperti menggunakan energi gas untuk memasak dan kebutuhan lain, menggunakan listrik untuk menunjang pekerjaan dan menggunakan transportasi pribadi dengan sepeda motor atau kendaraan umum.

Kesejahteraan penerima manfaat juga didukung dengan fasilitas dari ruang publik dan infrastruktur, sebagaimana mereka tinggal di Kecamatan Babakan Ciparay yang berada di perkotaan. Penerima manfaat dapat melakukan kegiatan bermasyarakat, merasakan kenyamanan dan keamanan di lingkungan mereka tinggal, mampu bersosialisasi, mampu bekerjasama dengan keluarga dan lingkungannya. Selain itu, didukung dengan kemudahan akses untuk menjaga layanan yang ada.

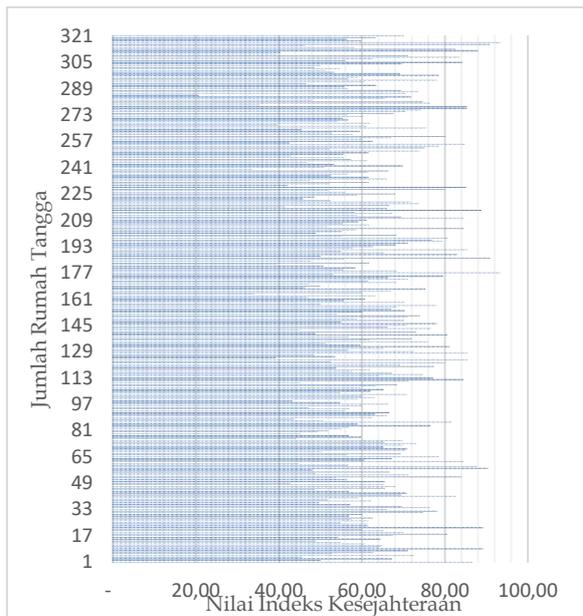
Kesejahteraan inti dan dukungan menggambarkan bahwa aset produktif yang dimiliki oleh penerima manfaat didukung oleh aksesibilitas di Kecamatan Babakan Ciparay mampu menunjang kesejahteraan rumah tangga. Hal ini sebagaimana hasil penelitian (Rozanti et al., 2021) dari dasar penelitiannya bahwa produktivitas rumah tangga yang dipengaruhi oleh karakteristik kepala rumah tangga dalam mengelola aset produktif yang didukung oleh akses infrastruktur dapat meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Akan tetapi, jika melihat kesejahteraan per rumah tangga (penerima manfaat), maka peneliti menemukan hal yang berbeda. Namun demikian, jika melihat jumlah persentase tingkat kesejahteraan per rumah tangga KPM, terdapat tingkat kesejahteraan yang variatif.

Gambar 1 menunjukkan kondisi tingkat kesejahteraan tiap rumah tangga KPM PKH di Kecamatan Babakan Ciparay. Terdapat perbedaan tingkat kesejahteraan antar satu

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022  
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

keluarga dengan lainnya meskipun mereka berada dalam satu tempat yang sama. Ini artinya ada kecenderungan perbedaan penilaian komponen dari kesejahteraan inti dan kesejahteraan pendukung yang dibuat dari keputusan individu/KPM. Hal ini menunjukkan KPM mampu membuat suatu keputusan berdasar pada penilain sendiri atas pengalamannya. Kondisi ini yang membentuk kesejahteraan subjektif. Oleh karena itu, dari 321 rumah tangga KPM, terdapat KPM yang memiliki indeks terendah di nilai 20.70 dan memiliki indeks tertinggi sebesar 93.33. Artinya, bahwa berdasarkan klasifikasi tingkat kesejahteraan, ada status Pra sejahtera sebanyak 24.92%, rumah tangga berstatus Sedang sebanyak 25.23%, rumah tangga berstatus Sejahtera sebanyak 24.92% dan rumah tangga berstatus Sejahtera Plus sebanyak 24.92%.



Sumber: data diolah dari Kuesioner penelitian

Gambar 1: Jumlah Indeks Kesejahteraan Rumah Tangga di Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung

Hasil ukuran kesejahteraan rumah tangga mampu menyajikan informasi KPM PKH dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Ini dapat dijadikan resertifikasi dalam penilaian kesejahteraan rumah tangga miskin, khususnya di perkotaan. Meskipun pendekatan NeSP belum mengarah ke intra-kesejahteraan rumah tangga. Setidaknya, pendekatan NeSP menghasilkan gambaran dalam menjangkau akses layanan dasar seperti standar hidup: seperti kepemilikan

aset, pendidikan dan kesehatan, dukungan dari beberapa aspek: seperti sosial, ekonomi, lingkungan, politik, ketersediaan infrastruktur dan layanan dalam menunjang mobilitas ke beberapa sarana prasarana barang/jasa. Selain itu, ukuran kesejahteraan dapat dijadikan data kuantitatif dalam memonitoring kesejahteraan penerima manfaat. Hal ini berkaitan dengan hasil temuan tentang graduasi sejahtera mandiri dilakukan berdasarkan penilaian pendamping dan masyarakat sendiri terhadap kondisi keluarga, yang merupakan sesuatu yang mungkin sulit dinilai secara objektif. Penilaian tersebut tidak mencakup pertimbangan standar (Syamsulhakim & Khadijah, 2021)

Pengukuran kesejahteraan dan kemiskinan melalui *Nested spheres of poverty* (NeSP), dapat menyajikan data untuk penanganan kemiskinan bagi KPM PKH. Sebagaimana pada rumah tangga yang berstatus Pra sejahtera dapat memberikan informasi berkaitan dengan kelemahan mereka dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Sebab, ada bagian yang menjadi kelemahan rumah tangga dalam meningkatkan kesejahteraan: apakah kelemahan pada kesejahteraan subjektif, inti atau dukungan. Sebab, rumah tangga yang berstatus Pra sejahtera, tidak semua indeks kesejahteraan memiliki nilai rendah meskipun terdapat semua indeks berada pada kuartil pertama. Begitu juga dengan status kesejahteraan lainnya pada Sedang, Sejahtera dan Sejahtera Plus. Oleh sebab itu, prioritas yang diambil adalah melihat nilai indeks terendah untuk dilakukan asesmen. Tujuannya adalah untuk memberikan penanganan yang lebih efektif dan efisien yang dibutuhkan oleh penerima manfaat.

Pendekatan strategi intervensi bagi penerima manfaat harus menyesuaikan kondisi mereka yang notabene berada di perkotaan. Tentu ini akan berbeda dengan kondisi kemiskinan di pedesaan. Sebagaimana pada pedoman pelaksanaan PKH bahwa untuk meluluskan kepesertaan program keluarga harapan berdasar pada nilai pendapatan perkapita sesuai dengan kabupaten/kota. Namun belum mengarah kepada bagaimana setiap keluarga penerima manfaat mampu meningkatkan kesejahteraan berdasar pada karakteristik daerahnya. Oleh sebab itu, kebijakan mengenai kemiskinan harus disesuaikan dengan karakteristik dan ukuran

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022  
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth  
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

status kesejahteraan rumah tangga didaerahnya masing-masing. Hal lain juga perlu dilakukan bagaimana intra-kesejahteraan keluarga KPM PKH. Hal ini perlu dilakukan mengingat kesejahteraan keluarga berasal dari kesejahteraan individu di dalam rumah tangga.

Pembeda kemiskinan perkotaan dan pedesaan terlihat pada faktor-faktor kemiskinan rumah tangga. Selain itu, indikator kemiskinan tidak seluruhnya mampu diterapkan semua pada keluarga penerima manfaat yang ada di daerah masing-masing. Hal lain juga dari karakteristik perkotaan, pinggiran dan pedesaan yang memiliki perbedaan. Sebagaimana (Klugman, 2002)) menerangkan konteks urban atau perkotaan bahwa kemiskinan dan kerentanan dapat dihubungkan dengan perbedaan karakteristik kehidupan perkotaan, seperti kepadatan penduduk fragmentasi sosial atau kurangnya komunitas dan mekanisme antar rumah tangga dalam mendukung jaminan sosial serta ketergantungan pada ekonomi tunai atau komodifikasi yang menyebabkan cara pandang penerima manfaat dalam menerima bantuan baik dari pemerintah pusat atau daerah. Kondisi kemiskinan dan kerentanan tersebut mampu membentuk faktor kemiskinan rumah tangga.

Kondisi lain juga menyebabkan pada subjektivitas penerima manfaat atas deprivasi ke objektivitas (inti dan dukungan). Sebagaimana (Rukumnuaykit, 2015) menjelaskan bahwa perbedaan *subjective wellbeing* dalam kemiskinan perkotaan dan pedesaan menjelaskan bahwa pertimbangan kemiskinan perkotaan lebih mengalami pada kesejahteraan psikologis karena tinggal di perkotaan yang diakibatkan oleh rumah dibawah standar, keterbatasan lahan, tingkat kejahatan tinggi, jaringan sosial lebih sedikit dan adanya tingkat kebisingan oleh mobilitas penduduk. Selain itu disebabkan bukan karena karakteristik, melainkan perbedaan SARA, dan kondisi keluarga. Berdasar pada kondisi tersebut, maka *subjective well being* akan mempengaruhi kondisi hidup, baik kualitas dan standar hidup.

### C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Tingkat kesejahteraan rumah tangga keluarga penerima dengan *Nested Spheres of Poverty* di wilayah perkotaan menggambarkan kemampuan untuk dapat hidup sejahtera bagi KPM PKH. Ini terjadi karena implikasi dari subjektifitas dan objektivitas mampu berjalan secara simultan.

Pendekatan multidimensional dalam mengukur kesejahteraan dapat dijadikan pemantauan tingkat kemiskinan dan kesejahteraan dalam pelaksanaan proses graduasi. Meskipun tingkat kesejahteraan KPM PKH di perkotaan belum mengarah ke intra-kesejahteraan rumah tangga. Oleh karena, untuk lebih mengembangkan dalam menentukan tingkat kesejahteraan perlu disajikan atau disandingkan karakteristik kesejahteraan rumah tangga sehingga lebih terukur. Karena faktor kesejahteraan dapat ditentukan dari karakteristik rumah tangga seperti, pendapatan, ukuran rumah tangga, gender dalam kepala keluarga, usia, pekerjaan, pendidikan, dan status kawin.

### REFERENSI

Behrman, J. R., Gallardo-García, J., Parker, S. W., Todd, P. E., & Vélez-Grajales, V. (2012). Are conditional cash transfers effective in urban areas? Evidence from Mexico. *Education Economics*, 20(3), 233-259. <https://doi.org/10.1080/09645292.2012.672792>

Cahyadi, N., Hanna, R., Olken, B. A., Prima, R. A., Satriawan, E., & Syamsulhakim, E. (2020). Cumulative Impacts of Conditional Cash Transfer Programs: Experimental Evidence from Indonesia. *American Economic Journal: Economic Policy*, 12(4), 88-110. <https://doi.org/https://doi.org/10.1257/po1.20190245>

Cahyat, A., Gönner, C., & Haug, M. (2007). *Assessing Household Poverty and Wellbeing – A Manual with Examples from Kutai Barat, Indonesia*. Center for International Forestry Research. <https://doi.org/https://doi.org/10.17528/cifor/002265>

Chiappori, P. A., & Meghir, C. M. (2014). Intra-Household Welfare. In *NBER Working Papers 20189, National Bureau Of Economic Research, Inc.* (Vol. 39, Issue 20189). [Http://www.Nber.Org/Papers/W20189.Pdf](http://www.Nber.Org/Papers/W20189.Pdf)

Chiappori, P. (2016). *Welfare and the Household*. *March* 2018, 1-25. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199325818.013.26>

Cramer, V., Torgersen, S., & Kringlen, E. (2004). Quality of life in a city: The effect of population density. *Social Indicators Research*, 69(1), 103-116.

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022  
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth  
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

- <https://doi.org/10.1023/B:SOCI.0000032663.59079.0b>
- Diener, E. (1984). Subjective Well-being. In *Psychological Bulletin* (Vol. 95, Issue 3, pp. 542-575). American Psychological Association, Inc.
- Diener, E., Sandvik, E., Seidlitz, L., & Diener, M. (1993). The Relationship Between Income and Subjective Well-being Relative or Absolute? *Social Indicators Research*, 28, 195-223.
- Gonner, C., Haug, M., Cahyat, Wollenberg, de Jong, W., Limberg, G., Cronkleton, P., Moeliono, M., & Becker, M. (2007). Capturing nested spheres of poverty: a model for multidimensional poverty analysis and monitoring. *Capturing Nested Spheres of Poverty: A Model for Multidimensional Poverty Analysis and Monitoring*.  
<https://doi.org/10.17528/cifor/002255>
- Kittiprapas, S. (2009). Subjective-well-being: New paradigm for measuring progress and public policies. *3rd OECD World Forum*.
- Klugman, J. (2002). A Sourcebook for Poverty Reduction Strategies. In J. Klugman (Ed.), *A Sourcebook for Poverty Reduction Strategies* (Vol. 2). The World Bank.
- Lehman, A. F., Rachuba, L. T., & Postrado, L. T. (1995). Demographic influences on quality of life among persons with chronic mental illnesses. *Evaluation and Program Planning*, 18(2), 155-164.  
[https://doi.org/10.1016/0149-7189\(95\)00006-W](https://doi.org/10.1016/0149-7189(95)00006-W)
- Nazara, S., & Rahayu, S. K. (2013). Program Keluarga Harapan (PKH): Indonesian Conditional Cash Transfer Program. *Policy Research Brief*, 42(October), 5.
- Rukumnuaykit, P. (2015). Urbanisation, Poverty and Subjective Well-Being: Empirical Evidence from Thailand. *Urban Policy and Research*, 33(1), 98-118.  
<https://doi.org/10.1080/08111146.2014.980901>
- Syamsulhakim, E., & Khadijah, N. (2021). Graduating from a Conditional Cash Transfer Program in Indonesia. In *Graduating from a Conditional Cash Transfer Program in Indonesia*.  
<https://doi.org/10.1596/36784>
- World Bank. (2000). *World Attacking Development* (Issue September).
- World Bank. (2009). Conditional Cash Transfers: Reducing Present and Future Poverty, A World Bank Policy Research Report. In *The World Bank*.